

PPKN SEBAGAI PONDASI DEMOKRASI: PENGUATAN KESADARAN KEWARGANEGARAAN ANAK SEKOLAH DASAR

Jelsy Anjelina^{1*}, Khamim Zarkasih Putro²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat email: 25204081005@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Civics Education plays a fundamental role as the foundation of democracy in shaping the civic awareness of elementary school children. This article aims to analyze the role of PPKn in strengthening elementary school students' democratic awareness and to examine the pedagogical factors that support the process of internalizing democratic values. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach through a systematic review of national and international scientific literature relevant to civic education, democratic education, and participatory learning at the elementary school level. The results of the study show that participatory, contextual, and active learning-oriented PPKn learning can increase students' democratic awareness not only in cognitive aspects but also in attitudes and behaviors, such as tolerance, participation, social responsibility, and respect for differences. In addition, the role of teachers as facilitators, role models, managers of a democratic classroom climate, and mediators of dialogue has proven to be a key factor in the internalization of democratic values.

Keyword: Civic Education, Democratic Awareness, Elementary School, Participatory Learning.

Abstrak

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran fundamental sebagai pondasi demokrasi dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan anak sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPKn dalam memperkuat kesadaran demokrasi siswa sekolah dasar serta mengkaji faktor-faktor pedagogis yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* melalui kajian sistematis terhadap literatur ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan demokrasi, dan pembelajaran partisipatif pada jenjang sekolah dasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada pengalaman belajar aktif mampu meningkatkan kesadaran demokrasi siswa tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku, seperti toleransi, partisipasi, tanggung jawab sosial, serta penghargaan terhadap perbedaan. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator, teladan, pengelola iklim kelas demokratis, dan mediator dialog terbukti menjadi faktor kunci dalam internalisasi nilai demokrasi.

Kata Kunci: Kesadaran Demokrasi, Pembelajaran Partisipatif, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan bagian integral dari system pendidikan di Indonesia yang berfungsi sebagai wahana Pendidikan demokrasi dengan tujuan menanamkan nilai, prinsip, serta budaya demokrasi pada warga negara sejak dini. PPKn tidak hanya mengajarkan pengetahuan formal tentang demokrasi tetapi juga berpotensi memperkuat kesadaran demokratis peserta didik di sekolah dasar melalui pengalaman praktis pembelajaran yang reflektif dan partisipatif (Widiyanto & Istiqomah, 2023). Pembelajaran PPKn secara sistematis pada jenjang SD bisa menumbuhkan kesadaran demokrasi pada siswa melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai karakteristik anak SD, seperti diskusi, simulasi, dan kerja kelompok yang dapat

meningkatkan pemahaman demokratis mereka (Setiawati et al., 2024).

Kesadaran demokrasi pada anak SD juga terkait erat dengan pengembangan karakter, kewarganegaraan yang melibatkan nilai tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesadaran akan keragaman masyarakat, yang diperkuat melalui pengalaman belajar yang terstruktur (Khaerul Ummah BK et al., 2024). Efektivitas pembelajaran PPKN dalam membentuk kesadaran demokrasi, partisipasi aktif serta tanggung jawab sosial bisa menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang memungkinkan siswa aktif selama pembelajaran (Erliana et al., 2024). Jadi PPKN didirikan untuk mengembangkan tidak hanya aspek kognitif peserta didik tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti kesadaran demokrasi.

Namun praktik pembelajaran PPKN di lapangan masih menghadapi kendala nyata seperti kesiapan guru yang belum memadai untuk mengajar kompetensi kewarganegaraan serta kesiapan pedagogis menghadapi tuntutan pembelajaran kontekstual dan inovatif, hal itu menunjukkan hambatan dalam fasilitas pembelajaran demokratis dan partisipatif di kelas (Raharjo, 2022). Kendala lain yaitu seperti pembelajaran masih monoton dan guru sering menggunakan metode ceramah serta strategi pembelajaran yang kurang menarik, sehingga minat dan keaktifan siswa rendah dan pemahaman nilai kewarganegaraan cenderung kognitif saja bukan afektif atau kontekstual (Septiani et al., 2024). Kendala lain juga muncul karena minimnya penggunaan berbagai model pembelajaran interaktif atau partisipatif seperti diskusi kelompok, *inquiry learning*, proyek. Hal ini membuat pengalaman belajar menjadi kurang hidup dan internalisasi nilai demokrasi masih terbatas (Putri et al., 2024). Kajian empiris juga menyebutkan bahwa rendahnya variasi metode pembelajaran, keterbatasan sumber daya guru, serta kurangnya integrasi nilai demokrasi dalam praktik pembelajaran masih menjadi hambatan dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi anak SD secara optimal (Fauziah, 2024). Rendahnya kesadaran demokrasi pada siswa sekolah dasar disebabkan oleh dominasi metode pembelajaran normatif yang kurang mendorong keaktifan siswa, terbatasnya penerapan model pembelajaran inovatif, serta minimnya integrasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Penelitian mengenai Pendidikan kewarganegaraan pada anak usia sekolah dasar menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran demokrasi melalui pengenalan nilai hak, kewajiban, dan partisipasi sosial sejak dini (Setiawati et al., 2024). Penelitian lain juga menegaskan bahwa pembelajaran PPKn berbasis diskusi dan kerja kelompok bisa meningkatkan sikap toleransi, penghargaan terhadap pendapat orang lain, dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan kelas (Halimah & Anisah, 2018) (Zarkasih Putro & Jannah, 2022). Dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan di jenjang sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran demokrasi anak melalui penanaman nilai hak dan kewajiban serta partisipasi sosial sejak dini (Putro, 2022).

Kajian nasional yang dilakukan pada siswa sekolah dasar menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi berkembang secara optimal ketika guru secara sadar mengintegrasikan praktik demokratis seperti musyawarah dan pemilihan ketua kelas dalam pembelajaran PPKn (Maruf Alfiyana & Anggareni Dewi, 2021). Praktik seperti musyawarah dan pemilihan ketua kelas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran konseptual, tetapi juga sebagai pengalaman nyata yang memungkinkan siswa belajar demokrasi melalui Tindakan (*Learning by doing*). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran demokrasi akan berkembang lebih optimal apabila guru berperan aktif sebagai fasilitator yang secara sengaja menciptakan ruang partisipasi, dialog, dan pengambilan keputusan bersama, sehingga pembelajaran PPKN tidak berhenti pada tataran normative, melainkan bertransformasi menjadi proses internalisasi nilai demokrasi dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang PPKn pada jenjang sekolah dasar umumnya menekankan pada implementasi pembelajaran dan pengenalan nilai-nilai demokrasi secara *normative*, seperti hak, kewajiban, toleransi, dan partisipasi siswa dalam kegiatan di kelas. Sehingga belum secara mendalam mengkaji bagaimana kesadaran demokrasi terbentuk sebagai disposisi kewarganegaraan yang terinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari siswa. Berdasarkan urgensi dan landasan teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) sebagai pondasi demokrasi dalam memperkuat kesadaran

kewarganegaraan anak sekolah dasar, khususnya dalam aspek pemahaman nilai demokrasi, sikap partisipatif, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi pedagogis pembelajaran PPKn yang mampu membangun kesadaran demokrasi secara berkelanjutan sebagai dasar pembentukan warga negara yang demokratis di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan SLR digunakan dan dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan terstruktur terhadap perkembangan kajian ilmiah pada suatu tema tertentu, serta menghindari bias subjektivitas yang sering muncul dalam tinjauan pustaka naratif. SLR juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian (*Research Gap*), serta arah pengembangan kajian selanjutnya secara berbasis bukti ilmiah (Astri et al., 2025).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa artikel jurnal nasional serta internasional bereputasi yang telah melalui proses peer-review dan dipublikasikan secara terbuka (*Open Acces*). Artikel yang digunakan berasal dari basis data ilmiah seperti *Google Scholar*, *DOAJ*, *ScienceDirect*, Serta portal jurnal nasional yang menyediakan akses penuh terhadap dokumen PDF. Kriteria inklusi meliputi artikel yang relevansi dengan topik penelitian, dipublikasikan dalam rentang tahun tertentu yaitu 2016-2024, ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan tersedia dalam bentuk full-text. Sementara itu, artikel berupa skripsi, tesis, disertasi, prosiding non-review, serta publikasi yang tidak dapat diakses secara penuh dikeluarkan dari analisis (Page et al., 2021).

Dari penelusuran tersebut diperoleh 186 artikel, kemudian dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak sehingga tersisa 62 artikel yang relevan. Selanjutnya, melalui telaah teks lengkap, 34 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria metodologis atau tidak berfokus pada konteks sekolah dasar, sehingga diperoleh 28 artikel yang dianalisis lebih lanjut. Adapun kriteria inklusi meliputi artikel yang membahas pembelajaran PPKn di jenjang sekolah dasar, serta memuat tema nilai demokrasi seperti partisipasi, toleransi dan tanggung jawab sosial. Sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel yang bersifat opini atau konseptual tanpa metode penelitian, tidak relevan dengan konteks SD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang dirumuskan berdasarkan fokus penelitian. Proses pencarian dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi awal artikel, kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan (*Screening*) berdasarkan judul dan abstrak, serta seleksi akhir melalui pembacaan teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Untuk meningkatkan transparansi dan keterlusuran proses seleksi, penelitian ini mengacu pada prinsip pelaporan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang banyak digunakan dalam penelitian SLR lintas disiplin ilmu (Page et al., 2021).

Analisis data dilakukan melalui ekstraksi dan sintesis tematik terhadap artikel-artikel yang telah terpilih. Setiap artikel dianalisis untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, metode yang digunakan, fokus kajian, serta temuan utama yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta kecenderungan hasil penelitian. Hasil sintesis disajikan dalam bentuk narasi analitis yang bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian dan mengungkap celah penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut (Snyder, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kesadaran Demokrasi Anak Sekolah Dasar Melalui PPKn Partisipatif

Hasil berbagai studi empiris dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dasar secara signifikan mendorong tumbuhnya kesadaran demokrasi pada siswa. Studi literatur terbaru menemukan bahwa pembelajaran PPKn yang mengutamakan pengalaman belajar aktif, dialog, dan keterlibatan

siswa dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, tanggung jawab, dan kebebasan berekspresi. Penelitian Rahayu menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan di Tingkat SD membekali peserta didik dengan karakter kewargaan yang baik, toleransi, serta kemampuan berpikir kritis, yang merupakan komponen penting dalam kesadaran demokrasi (Rahayu et al., 2024).

Penelitian serupa juga menguatkan temuan ini dengan menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn di sekolah dasar secara langsung membantu pembangunan *citizenship awareness* siswa yang aktif dan partisipatif dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat kecil. Hal ini tercermin dalam kesiapan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sejak usia dini (Sunaryati et al., 2023). Selain itu, studi lain mencatat bahwa transformasi paradigma pembelajaran PPKn dari model tradisional ke model partisipatif seperti diskusi, debat kelas, dan simulasi pengambilan keputusan memperkuat kecakapan demokrasi siswa.

Pembelajaran PPKn partisipatif terbukti lebih efektif daripada pendekatan konvensional karena memindahkan focus dari hanya menghafal konsep ke pengalaman aktif berinteraksi dengan nilai-nilai demokrasi dalam konteks nyata. Ini sejalan dengan penelitian pedagogic internasional yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran partisipatif seperti *discussion-based learning*, *cooperative learning* meningkatkan *civic engagement* siswa melalui pengalaman langsung dan mengambil keputusan dan negosiasi norma kelas. Metode semacam itu membangun kesadaran demokrasi bukan hanya kognitif tetapi juga secara sosial dan afektif (Kosberg, 2024). Studi ini juga menunjukkan bahwa guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang partisipasi siswa dalam diskusi dan kegiatan nyata simulasi pemungutan suara, penyusunan aturan kelas atau proyek komunitas. Konsep *student-centered learning* seperti ini berimplikasi langsung pada pembentukan kesadaran demokrasi yang berkelanjutan (Kosberg, 2024).

Temuan lain menunjukkan bahwa pendekatan inovatif yang interaktif dalam pembelajaran PPKn mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi ketika materi dihubungkan dengan situasi nyata siswa seperti penggunaan diskusi kelas, simulasi nilai demokrasi dalam aktivitas sekolah serta pengalaman kelas kontekstual (Fitria & Witanto, 2024). Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran PPKn memperkuat kesadaran sosial dan keterlibatan mereka dalam kelompok sosial, yang merupakan indikator penting dari kesadaran demokrasi. Pembelajaran yang berpusat pada pengalaman siswa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan warga negara yang tidak hanya tahu tentang demokrasi tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi pembelajaran inovatif yang diterapkan guru seperti penggunaan pendekatan kontekstual, diskusi kelas, dan kegiatan pengalaman langsung, sangat meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai demokrasi dan memotivasi mereka untuk ikut serta dalam keputusan kelas maupun kegiatan sosial sekolah yang menjadi indikator terkuat dari kesadaran demokrasi siswa SD. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Learning* dalam PPKn sangat krusial bagi perkembangan kompetensi demokratis anak (Fitria & Witanto, 2024). Dengan demikian, siswa terlatih berpikir kritis dan mampu menerima serta menghormati pendapat berbeda dua kompetensi yang menjadi pilar kesadaran demokrasi. Analisis tambahan dari literatur lain memperkuat bahwa PPKn merupakan sarana utama untuk internalisasi nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan terhadap hak orang lain, dan tanggung jawab sosial (Oktaviana et al., 2023). PPKn bukan sekedar transfer pengetahuan tetapi juga sebagai *educational practice* yang menumbuhkan perilaku demokratis melalui penerapan aktif dalam konteks sekolah dan kehidupan sosial anak. Ini relevan dengan teori Pendidikan demokrasi yang menekankan *learning by doing*.

Tabel berikut menyajikan sintesis temuan-temuan penelitian terkait penguatan kesadaran demokrasi anak sekolah dasar melalui pembelajaran PPKn yang partisipatif. Penyajian tabel ini bertujuan untuk memetakan bukti empiris mengenai dampak pendekatan partisipatif dalam PPKn terhadap perkembangan kesadaran demokrasi siswa, sekaligus menjadi dasar analisis konseptual pada bagian pembahasan:

Tabel 1. Penguatan Kesadaran Demokrasi Anak Sekolah Dasar Melalui PPKn Partisipatif

| Fokus Penelitian (Kesadaran Demokrasi) | Bentuk Pembelajaran PPKn Partisipatif | Pembahasan Analitis |
|---|--|--|
| Kesadaran Hak dan Kewajiban Siswa | Diskusi Kelompok, Studi Kasus Kontekstual | Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif siswa membantu transformasi pengetahuan kewarganegaraan dari sekadar hafalan menjadi pemahaman bermakna |
| Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan | Musyawarah kelas, simulasi pemilihan | PPKn partisipatif berfungsi sebagai wahana latihan demokrasi yang memungkinkan siswa mengalami proses demokratis secara langsung |
| Sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan | Kerja kelompok heterogen, diskusi kolaboratif | Interaksi sosial dalam pembelajaran partisipatif memperkuat nilai pluralisme dan toleransi sebagai elemen utama demokrasi |
| Tanggung jawab sosial | Penyusunan aturan kelas bersama, proyek kelompok | Keterlibatan siswa dalam merumuskan aturan mendorong rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif |
| Perkembangan sikap demokratis | Pembiasaan praktik demokrasi dalam PPKn | Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi berkembang sebagai disposisi perilaku, bukan hanya hasil pembelajaran kognitif |
| Peran guru dalam pembelajaran demokratis | Pendekatan student-centered learning | Guru yang berperan sebagai fasilitator menciptakan iklim kelas demokratis yang mendukung internalisasi nilai kewarganegaraan |

Meskipun tabel 1 menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn partisipatif melalui diskusi kelompok, musyawarah kelas, serta proyek kolaboratif efektif dalam memperkuat kesadaran demokrasi siswa, sejumlah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Seperti penelitian Sari dan Huda (2023) menemukan bahwa dalam praktik diskusi kelas, siswa yang aktif cenderung mendominasi, sementara siswa yang pasif sering kali hanya menjadi pendengar. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Putri (2022) yang mengaskan bahwa diskusi kelompok dan simulasi demokrasi di SD sering menghadapi kendala berupa minimnya keterampilan guru dalam memfasilitasi dialog yang setara, sehingga partisipasi siswa belum merata. Dengan demikian, meskipun data pada tabel 1 memperlihatkan potensi besar pembelajaran PPKn partisipatif dalam membangun kesadaran demokrasi anak sekolah dasar, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas guru dalam mengelola dinamika kelas secara inklusif. Tanpa pendampingan pedagogis

yang memadai, metode yang dirancang untuk menumbuhkan demokrasi justru berisiko menciptakan partisipasi semu, di mana hanya sebagian siswa yang benar-benar mengalami proses pembelajaran demokratis.

Peran Guru dalam Internalisasi Kesadaran Demokrasi Anak Sekolah Dasar

Hasil tinjauan menunjukkan konsisten bahwa pembelajaran PPKn yang efektif membutuhkan bukan hanya metode partisipatif tetapi juga guru yang menghayati peran fasilitator serta iklim kelas yang mendukung praktik demokrasi sehari-hari, sinergi ketiganya mendorong transformasi nilai demokrasi dari pengetahuan menjadi disposisi perilaku siswa seperti toleransi, partisipasi, tanggung jawab. Temuan ini didukung oleh kajian sistematis mengenai pengajaran untuk demokrasi dan studi tentang pembelajaran demokratis di sekolah dasar yang menunjukkan bahwa karakteristik interaksi kelas sangat berkaitan dengan perkembangan kompetensi demokratis (Pérez-rodríguez & Navarro-medina, 2024). Jadi guru yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan demokrasi berkontribusi signifikan dalam internalisasi nilai demokrasi siswa sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan kajian yang menemukan bahwa peran guru dalam pembelajaran PPKn yang demokratis mendukung penumbuhan sikap toleran, partisipatif, dan bertanggung jawab pada siswa sejak dini (Gea et al., 2025).

Iklim kelas demokratis ditandai oleh komunikasi dua arah, kebebasan berpendapat, aturan yang disepakati bersama, serta pengelolaan konflik secara dialogis berkorelasi positif dengan sikap demokratis siswa seperti toleransi, empati dan rasa tanggung jawab sosial. Sebuah penelitian yang berfokus pada suasana kelas melaporkan bahwa kelas yang mengadopsi praktik demokratis memperlihatkan peningkatan *sense of community* dan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah (Safruddin et al., 2023). Selain strategi mengajar, keteladanan guru yaitu praktik nyata guru memperlihatkan sikap adil, menghargai, dan transparan sehingga berfungsi sebagai *hidden curriculum* yang mempercepat internalisasi nilai demokrasi. Ketika guru konsisten bertindak demokratis siswa juga meniru pola interaksi tersebut dan menginternalisasikan norma demokrasi sebagai perilaku sehari-hari (Supeni, 2018).

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam membangun iklim kelas demokratis sebagai prasyarat internalisasi kesadaran demokrasi siswa. Iklim kelas yang demokratis ditandai oleh adanya kebebasan berpendapat, rasa aman psikologis, dialog dua arah, serta kesepakatan kelas yang disusun bersama. Dengan demikian iklim kelas yang dikelola secara demokratis berkorelasi positif dengan perkembangan sikap toleransi, empati sosial, dan tanggung jawab siswa, yang merupakan inti dari kesadaran demokrasi (Mapiasse, 2017). Internalisasi kesadaran demokrasi sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai mediator dialog dan perbedaan pendapat antar siswa. Guru yang mampu mengelola perbedaan pandangan secara dialogis membantu siswa memahami bahwa perbedaan merupakan bagian alamiah dari kehidupan demokratis. PPKn menunjukkan bahwa pembiasaan dialog yang difasilitasi guru meningkatkan kemampuan siswa untuk mendengarkan, menghargai, dan menyelesaikan perbedaan secara damai (Khuzaimah & Pribadi, 2022).

Oleh karena itu, guru merupakan kunci utama dalam internalisasi kesadaran demokrasi anak sekolah dasar. Melalui peran sebagai fasilitator, teladan, pengelola iklim kelas, dan pembiasa praktik demokrasi, guru menjembatani pembelajaran PPKn dari tataran kognitif menuju pembentukan sikap dan perilaku demokratis. Maka penguatan peran guru menjadi syarat fundamental agar PPKn benar-benar berfungsi sebagai pondasi demokrasi bagi generasi muda. Tanpa penguatan peran guru, Pendidikan demokrasi di sekolah dasar berpotensi tereduksi menjadi pembelajaran normative yang kurang berdampak pada sikap dan perilaku siswa.

Untuk memperjelas hasil sintesis temuan-temuan penelitian mengenai peran guru dalam internalisasi kesadaran demokrasi anak sekolah dasar, diperlukan pemetaan sistematis yang menggambarkan keterkaitan antara peran pedagogis guru, praktik pembelajaran yang diterapkan dan dampaknya terhadap perkembangan kesadaran demokrasi siswa. Disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Peran Guru dalam Internalisasi Kesadaran Demokrasi Anak Sekolah Dasar

| Aspek Peran Guru | Praktik Pembelajaran Yang Dilakukan | Pembahasan Analitis |
|---|---|--|
| Guru sebagai fasilitator pembelajaran demokratis | Diskusi kelas, musyawarah, simulasi pemilihan, kerja kelompok | Peran fasilitator memungkinkan siswa mengalami demokrasi secara langsung (<i>experiential learning</i>), sehingga nilai demokrasi tidak hanya dipahami secara konseptual tetapi diinternalisasi melalui pengalaman |
| Guru sebagai teladan (<i>role model</i>) nilai demokrasi | Sikap adil, terbuka terhadap pendapat siswa, konsisten menerapkan aturan | Keteladanan guru berfungsi sebagai <i>hidden curriculum</i> yang mempercepat internalisasi nilai demokrasi melalui proses imitasi perilaku |
| Guru sebagai pengelola iklim kelas demokratis | Penyusunan aturan kelas bersama, komunikasi dua arah, pemberian ruang berekspresi | Iklim kelas demokratis menjadi prasyarat utama agar siswa berani menyampaikan pendapat dan berlatih partisipasi demokratis |
| Guru sebagai mediator dialog dan konflik | Fasilitasi dialog saat terjadi perbedaan pendapat, penyelesaian konflik secara musyawarah | Mediasi guru membantu siswa memahami bahwa perbedaan merupakan bagian alamiah dari demokrasi dan harus dikelola secara dialogis |
| Guru sebagai pembimbing internalisasi nilai | Refleksi bersama, penguatan nilai setelah kegiatan demokratis | Refleksi pedagogis membantu transformasi nilai dari pengalaman belajar menjadi disposisi kewarganegaraan yang menetap |
| Guru sebagai penggerak pembiasaan praktik demokrasi | Pembiasaan pemilihan ketua kelas, musyawarah rutin, kerja kelompok berkelanjutan | Pembiasaan berulang menjadikan demokrasi sebagai budaya kelas, bukan sekadar aktivitas sesaat dalam pembelajaran PKn |

Berdasarkan tabel hasil dan pembahasan tersebut, dapat dianalisis bahwa internalisasi kesadaran demokrasi anak sekolah dasar sangat ditentukan oleh kualitas peran guru dalam pembelajaran PPKn. Guru tidak lagi berperan semata-mata sebagai penyampai pengetahuan kewarganegaraan, melainkan sebagai aktor kunci yang menghidupkan nilai-nilai demokrasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Ketika guru berfungsi sebagai fasilitator, teladan, mediator, dan pengelola iklim kelas demokratis, pembelajaran PPKn mampu bertransformasi dari pembelajaran normative menjadi proses internalisasi nilai yang berkelanjutan.

PENUTUP

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran strategis sebagai pondasi demokrasi dalam memperkuat kesadaran kewarganegaraan anak sekolah dasar. Pembelajaran PPKn yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual terbukti mampu mendorong perkembangan kesadaran demokrasi siswa tidak hanya pada ranah kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan perilaku. Selain itu, peran guru menjadi faktor kunci dalam proses internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui

keteladanan, fasilitasi dialog, pengelolaan iklim kelas demokratis, serta pembiasaan praktik-praktik demokrasi dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Dengan demikian, PPKn tidak sekedar berfungsi sebagai mata pelajaran normatif melainkan sebagai wahana pendidikan demokrasi yang berkelanjutan dalam membentuk warga negara muda yang demokratis sejak usia dini.

Kesadaran demokrasi anak berkembang secara lebih kuat ketika nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, partisipasi, dan penghargaan terhadap perbedaan dihadirkan secara berulang dan autentik dalam interaksi sehari-hari di kelas maupun budaya sekolah. Oleh karena itu, PPKn perlu dipahami sebagai proses pendidikan jangka panjang yang menekankan pembiasaan dan internalisasi, bukan sekedar pencapaian hasil belajar sesaat. Jika PPKn dikelola secara partisipatif, didukung oleh peran guru yang reflektif dan demokratis, serta ditopang oleh iklim sekolah yang kondusif, maka pendidikan kewarganegaraan berpotensi besar melahirkan generasi warga negara muda yang tidak hanya memahami demokrasi secara konseptual, tetapi juga mampu menghidupi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) atau kajian literatur sehingga temuan yang dihasilkan bersifat sintesis konseptual dan bergantung pada kualitas serta ruang lingkup sumber yang dianalisis, tanpa didukung oleh data empiris lapangan secara langsung. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan studi empiris dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods guna menguji secara langsung efektivitas pembelajaran PPKn partisipatif dan peran guru dalam membentuk kesadaran demokrasi siswa sekolah dasar. Diharapkan juga untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi siswa terkait praktik demokrasi kelas sebagai bagian dari proses internalisasi nilai kewarganegaraan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada para dosen dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang konstruktif selama proses penelitian. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada para peneliti terdahulu yang karya ilmiahnya menjadi rujukan penting dan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya landasan teoritis dan empiris penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, M., Abbas, Y., Hutauruk, M. R., & Wahyuti, S. (2025). *Systematic Literature Review (SLR): Dampak Financial Technology dan Literasi Keuangan pada Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kalimantan Timur*. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 4(3), 372–386. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5859>
- Erliana, L., Masyhuri, A. Al, Ayyubi, S. Al, & Dari, M. U. (2024). Tindakan Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran PPKn melalui Metode Diskusi Kelompok di SMP Negeri 5 Takengon. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 5(1), 290–304.
- Fauziah, S. (2024). Citizenship Education for Elementary School. *Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 2(2), 292–298.
- Fitria, N. V., & Witanto, Y. (2024). Fostering Democratic Citizenship: Innovative Approaches to Improve Civic Values in Elementary School Independent Curricula. *Mimbar PGSD Undiksha*, 12(2), 291–301.
- Gea, R., Harefa, A., Lase, B. P., Otniel, H., & Harefa, N. (2025). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Bagi Siswa melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 19–37.
- Halimah, L., & Anisah. (2018). Internalisasi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan pada Tradisi Pesta Laut Blanakan dalam Rangka Pengembangan Ideal Democratic Citizen. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 148–160.

- Khaerul Ummah BK, M., Hidayat, S., & MUstakim. (2024). Menumbuhkan Kesadaran Kewarganegaraan di Kalangan Anak- Anak SD : Implementasi Program Edukids. *JP2SD (Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar)*, 12(1), 28–51.
- Khuzaimah, & Pribadi, F. (2022). Penerapan Demokrasi Pendidikan pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar. *AL MA' ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA*, 4(1), 41–49.
- Kosberg, E. (2024). Exploring Cooperative Learning As A Tool in Civic Education. *Educational Research*, 66(4), 396–412. <https://doi.org/10.1080/00131881.2024.2398460>
- Mapiasse, S. (2017). Influence of the Democratic Climate of Classrooms on Student Civic Learning in North Sulawesi , Indonesia. *International Education Journal*, 8(2), 393–407.
- Maruf Alfiyana, F., & Anggareni Dewi, D. (2021). Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 303–305.
- Oktaviana, P. D., Kawuryan, S. P., & Saptono, B. (2023). Implementation of Pancasila Values in Civics Learning in the Digital Era. *Mimbar PGSD Undiksha*, 11(3), 384–395.
- Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., Mcdonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews. *RESEARCH METHODS AND REPORTING*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pérez-rodríguez, N., & Navarro-medina, E. (2024). Citizenship Education in Teacher Training : A systematic review. *Journal Of Social Science Education*, 23(3), 1–20.
- Putri, A., Hutabarat, D. F., Sitohang, S. R., & Novia, T. (2024). Tantangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Mengenai Keberagaman Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Studi Kasus di SD Negeri 024868 Binjai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25522–25526.
- Putro, K. Z. (2022). Lato-Lato Viral Games and Their Social Impact on Children. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies (JCGCS)*, 1(2), 36–40.
- Raharjo. (2022). Analisis Kesiapan Guru PPKN dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *PKn Progresif*, 17(2), 85–92.
- Rahayu, K., Yunitasari, D., Utaminingsih, E. S., Purwaningsih, I., & Sari, I. (2024). Exploring the Impact of Civic Education on Civic Participation among Elementary School Students. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 189–195. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v13i2.1658>
- Safruddin, C., Jabar, A., Kusumastuti, G., & Prabawati, W. (2023). Classroom Climate : Unique Dependent and Independent Variables. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 109–119.
- Septiani, D., Azis, A., & Syahrir, M. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Mata Pelajaran PPKn Berbantuan Media Papan Kantong untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IIIC di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(01), 97–105.
- Setiawati, I., Mahfuroh, L., & Azhas, N. F. (2024). Pentingnya Pembelajaran PKN SD Untuk Menumbuhkan Kesadaran Berdemokrasi Sejak Dini. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–10.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology : An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sunaryati, T., Laelly, T. A., & Noviyanti. (2023). Membangun Kesadaran Kewarganegaraan Yang Aktif Dan Partisipatif Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 865–875.

Supeni, S. (2018). Internalization Of Pancasila Character Education Through The Development Of A Grand Design In Early Childhood. *FKIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 197–201.

Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10.

Zarkasih Putro, K., & Jannah, M. (2022). Potret Sikap Toleransi Mahasiswa Program Studi Paud Dalam Penerapan Moderasi Beragama Di Iain Pekalongan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 107–118.